BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan oleh seorang individual atau sekelompok masyarakat yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Konsumen sendiri berasal dari kata “consument”, “konsument”, konsumen secara harfiah adalah orang yang membelanjakan atau menggunakan, baik suatu barang yang langsung digunakan maupun yang digunakan untuk kemudian hari. Pengertian secara yuridis tentang konsumen telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 yang dirumuskan sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹

Pengertian sehari-hari konsumen sering sekali dianggap sebagai pembeli. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli, apabila kita simak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat pada Pasal 1 butir 2 UUPK, dalam pasal tersebut tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil transaksi jual dan beli begitu saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 21

sebagai konsumen.² Istilah konsumen berasal dan alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument* / itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Konsumen dapat berupa :

1. Pemakai hasil produksi ;
2. Penerima pesan iklan ;
3. Pemakai jasa (pelanggan)

Indonesia yang merupakan negara terbesar padat penduduk dimana dengan jumlah masyarakat saat ini berkisar 273,8 juta jiwa.³ Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya.

Ideologi Indonesia adalah Pancasila, pada sila pertama berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia secara resmi adalah republik presidensial dan negara kesatuan tanpa agama negara yang mapan. Awalnya diusulkan "kewajiban syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di dalam undang-undang, tetapi akhirnya hal itu dihapus dengan tujuan untuk mengayomi semua masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam

² Siahaan N.T *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prdoux*, Jakarta: Pantai Rei, hlm 22-24

³ Badan Pusat Statistik Jumlah Sensus Penduduk Tahun 2023

Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Belakangan, Agama asli Nusantara juga telah diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 7 November 2017. Dalam sejarahnya, konflik antaragama juga telah terjadi di Indonesia. Program transmigrasi secara tidak langsung telah menyebabkan sejumlah konflik di wilayah timur Indonesia.⁴

Indonesia “merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 86,7% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia (seperti di Jawa dan Sumatra) hingga wilayah pesisir Pulau Kalimantan. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur. Pada abad ke-13, sebagian besar pedagang orang Islam dari Gujarat, India tiba di pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan (misalnya, sekitar tahun 1297 telah ada jemaah di Peureulak, Aceh Timur). Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha, seperti Majapahit dan Sriwijaya, mengalami kemunduran, dimana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali karena perang saudara akibat pemberontakan Suro, Nambi dan Kuti, sebagian Jawa dan Sumatra. Dalam beberapa kasus, ajaran Islam di Indonesia

⁴ Firman Freaddy Buroh, 2022, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*, (Rajawali Press; Jakarta), hlm 36

dipraktikkan dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan Islam daerah Timur Tengah.⁵

Pada abad ke 15 dan 16, penyebaran Islam dipercepat oleh pekerjaan pendakwah Maulana Malik Ibrahim di Sumatra dan di Jawa oleh Wali Songo, serta kampanye yang dipimpin oleh sultan yang menargetkan kerajaan Hindu-Budha dengan masing-masing mencoba mengukir wilayah atau pulau untuk dikendalikan. Empat kesultanan yang beraneka ragam dan berkesinambungan muncul di Sumatera bagian utara dan selatan, Jawa barat dan tengah, serta Kalimantan bagian selatan. Para sultan menyatakan Islam sebagai agama negara dan mengajarkan kesetaraan antara penduduk dengan mengancam perbudakan yang membuat ketertarikan penduduk saat itu. Juga cara pengajaran yang lembut dan memberikan pengetahuan seperti pertanian, peternakan dan kesenian yang menjadikan Islam agama yang --paling diterima. ⁶

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan halal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap, akhlak, jiwa (kepribadian)

⁵ Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam*, Jakarta;Kencana, hlm 3

⁶ *Ibid*

dan perilakunya.⁷ Umat Islam tentunya akan merasa tenteram jika produk produsen benar-benar ada jaminan kehalalannya. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.” Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi.⁸

Produk yang dinyatakan halal harus dijamin kehalalannya terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang memberikan izin pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal.

Banyaknya persaingan usaha di masyarakat untuk menyediakan kebutuhan pangan membuat setiap pelaku usaha rumah makan bersaing untuk membuat harga yang murah dalam setiap masakannya, mengingat tidak setiap konsumen berada dalam kalangan segementasi ekonomi menengah keatas. Harga yang murah tidak menjamin apakah makanan tersebut layak makan atau telah sesuai dengan standar yang ada. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang

⁷ Ahmad Syauqi al-Fanjari, 2016, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 44

⁸ *Ibid*

lebih aktif negara dalam pengaturan system ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara dalam menjalankan instrument perdagangan/ bisnis diantaranya melalui regulasi.⁹

Melansir berita dari detik.com gerai Mie Gacoan di Bogor Barat, kota Bogor telah disegel oleh Satpol PP karena Mie Gacoan dianggap tidak memiliki izin usaha. Disamping itu, banyak sekali isu beredar yang menyatakan bahwasannya Mie Gacoan memiliki kandungan minyak babi dalam proses pembuatan makanan yang dipasarkan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwasannya penyegelan berkedok izin operasional yang belum terbit ialah topeng dari hal ini. Di kota Medan sendiri banyak sekali rumah makan khas padang maupun restoran kecil yang tidak memiliki sertifikasi MUI dalam menjalankan usahanya, hanya dengan modal menempelkan stiker Halal pada dagangannya saja. Restoran Solaria juga pernah menjadi sorotan pada tahun 2015, pasalnya beredar isu bahwa Restoran Solaria menggunakan bahan Non Halal sehingga pihak MUI melakukan *Rapid Test* pada salah satu produk yang dijual oleh pihak restoran, dan hasilnya negatif mengandung produk non halal.

Masyarakat dinilai khawatir terhadap restoran maupun pelaku usaha kuliner yang ada pada saat ini. Rasa khawatir tersebut timbul dari banyak aspek yakni sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha
2. Lokasi Usaha
3. Bahan yang digunakan dalam proses pembentukan produk yang diperdagangkan

⁹ Ali Yafie, dkk, , 2024, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, hlm 77

4. Rasa dari produk yang diperdagangkan

Dari berita yang beredar, sebuah restoran besar saja bisa menimbulkan isu bahwasannya dalam proses pengelolaan produknya memiliki kandungan non halal. Bagaimana dengan restoran kecil yang ada di pinggir jalan raya?. Pemerintah melalui BPJPH serta MUI

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah Lembaga khusus untuk mengkaji pangan, obat, dan kosmetika (LP POM). Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI No. Kep. 18/MUI/1/1989. Tujuan didirikan lembaga ini adalah :¹⁰

1. Mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa mendatang.
2. Menjaga kaum muslim untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.¹¹ Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk Halal memiliki kriteria :

1. Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam

¹¹ Sri Nuryati, 2008 *Halalkan Makanan Anda?* , Solo : PT Aqwam Media Profetika, Hlm 155

4. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk Auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu setiap produk yang telah mendapatkan sertifikat halalnya harus diperpanjang setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun sejak terhitung berlakunya sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dengan hadirnya perlindungan konsumen di bidang pangan dengan maksud dan tujuan adalah memberikan keamanan pangan bagi konsumen konsumen. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Masyarakat pada umumnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian ataupun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen.

Pengaturan hukum positif dalam lapangan hukum pidana secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana ini sendiri termasuk pada kategori dalam hukum publik, karena hukum pidana mengatur hubungan hukum antara Negara dengan masyarakat. Hukum Pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, akan tetapi di dalam KUHP itu sendiri tidak disebutkan kata konsumen, tetapi hanya secara implisit. Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan

dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar, pasal yang memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai contoh :¹²

1. Pasal 204 KUHP menyatakan :

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

2. Pasal 205 KUHP menyatakan :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.”

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang

¹² Aulia Muthiah “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, *Dialogica Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.7, No.2, 2016, hlm 87

harus diemban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban konsumen kepada pelaku usaha.

Pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK adalah hak konsumen mendapatkan produk yang baik sehingga pelaku usaha harus memberikan produk yang berkualitas. Ada hubungan sebab akibat antara aspek kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen, jika pelaku usaha telah mampu mengindahkan kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan pemenuhan hak konsumen telah terpenuhi; oleh karena itu kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan hak konsumen merupakan hubungan sebab akibat dari hak dan kewajiban. Antara kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha dan hak konsumen merupakan aktualisasi konkrit dari hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dalam penelitian dapat dirumuskan, permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana peran BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melindungi Konsumen dalam menjamin kehalalan produk yang dipasarkan ?
- 2 Kendala apa yang dialami BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam memberikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

¹³ Aris Prio Agus Santoso, 2021, *dkk Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu pendekatan praktis dan aplikatif)*, Yogyakarta : Pustaka Baru, hlm 32

1. Menganalisis dan mengetahui peran BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal MUI.
2. Menelusuri dan mengimplementasikan pentingnya sertifikat halal MUI dalam produk yang diperdagangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

Untuk memberikan penambahan wawasan masyarakat tentang pentingnya Sertifikat Halal MUI yang diterbitkan oleh BPJPH dalam produk yang dikonsumsi.

2. Bagi Praktisi

Untuk turut membantu masyarakat baik pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal MUI dengan cara yang baik dan benar, serta memenuhi dan mengikuti seluruh prosedur dan tata cara yang ada